

PROGRAM INDONESIA PINTAR: ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA SATUAN PESERTA DIDIK DALAM UPAYA PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN

Novrian Satria Perdana

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud
novrian1711@gmail.com

ABSTRAK

Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Murni (APM) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Dalam upaya mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, Pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan untuk peserta didik dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam pemberian bantuan dana PIP akan memiliki manfaat lebih maksimal bagi siswa penerima jika besarnya mendekati kebutuhan riil peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menghitung besaran biaya satuan peserta didik yang dapat diberikan kepada penerima PIP dari masing-masing jenjang pendidikan dengan memperhatikan kondisi kelompok pengeluaran 40% terbawah. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder yang bersumber dari BPS 2019. Data tersebut kemudian diolah menurut kondisi masing-masing daerah dan indikator ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan, besaran biaya satuan untuk skala Nasional tahun 2019 menurut indikator ekonomi diperoleh hasil untuk jenjang SD sebesar Rp 1.495.510, jenjang SMP sebesar Rp 2.683.959, dan jenjang SM sebesar Rp 4.355.553. Implikasi penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan besaran PIP ideal yang mendekati kebutuhan riil peserta didik.

Kata Kunci: Bantuan Dana, PIP, Biaya Satuan

ABSTRACT

Until now, the disparity of school participation among community groups is still quite high. The Net Enrollment Rate (APM) of economically capable families is generally higher than that of poor families. One reason is the high cost of education both direct and indirect costs borne by students. In an effort to encourage increased access to education services, the Government provides educational funding for students in the form of the Smart Indonesia Program (PIP). In granting PIP funding assistance will have more maximum benefits for recipient students if the amount approaches the real needs of students. Based on this, the purpose of this study is to calculate the amount of student unit costs that can be given to PIP recipients from each level of education by taking into account the condition of the lowest 40% expenditure group. This study uses secondary data analysis sourced from BPS 2019. The data is then processed according to the conditions of each region and economic indicators. Based on the calculation results, the amount of unit costs for the National scale in 2019 according to economic indicators obtained results for the elementary school level of Rp. 1,495,510, the junior high school level of Rp2,683,959, and the SM level of Rp4,355,553. The implication of this research is in the form of a policy recommendation for the ideal PIP magnitude that approaches students' real needs.

Keywords: Funding Assistance, PIP, Unit Cost

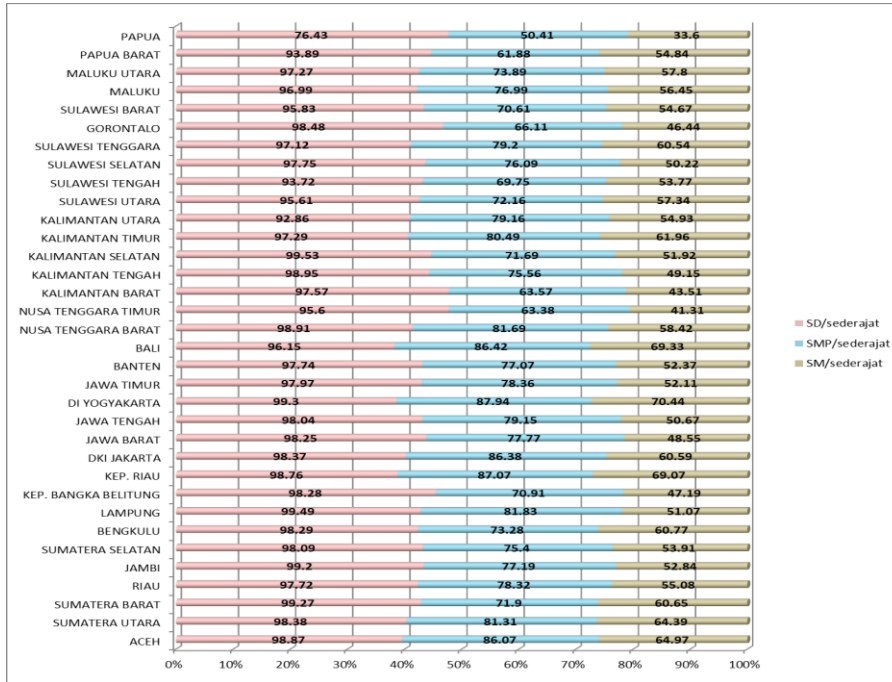
PENDAHULUAN

Hingga saat ini konsep tentang pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investment*) masih terus berkembang. Sektor pendidikan merupakan kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Schultz dalam Widiansyah (2017) memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut *World Economic Forum* (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah faktor kunci untuk pertumbuhan, pengembangan dan daya saing. Pekerja akan menjadi lebih terampil dan produktif di tempat bekerja apabila memiliki pengetahuan yang mumpuni. Di tingkat nasional, persamaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan memiliki korelasi positif dalam peningkatan kualitas pekerjaan yang akhirnya dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan social politik suatu Negara. Dengan kata lain bahwa pencapaian pendidikan pada semua level akan dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, karena pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi.

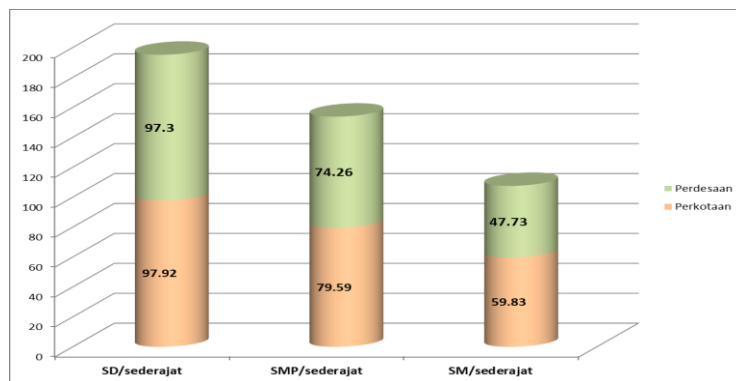
Hubungan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi juga diungkapkan oleh Liao, dkk (2019), yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai investasi dalam sumber daya manusia, dianggap sebagai penentu penting pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini karena adanya umpan balik kausalitas antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut laporan UNICEF (2015), tingkat pengembalian pendidikan diperkirakan dengan membandingkan peningkatan pendapatan pasar tenaga kerja individu (manfaat) dari penyelesaian tahun tambahan pendidikan dengan biaya yang meningkat. Orang dewasa dengan tingkat pendidikan tinggi rata-rata memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Secara global, pengembalian investasi pendidikan untuk pribadi rata-rata selama satu tahun tambahan pendidikan ditemukan peningkatan 10 persen dalam pendapatan.

Mengingat pentingnya pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara, Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Akses pendidikan salahsatunya digambarkan dengan capaian Angka Partisipasi Murni (APM). Secara umum, APM digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan, khususnya siswa dari keluarga tidak mampu. Untuk mengukur keberhasilan program pendidikan bagi masyarakat miskin maka digambarkan melalui APM menurut kelompok pengeluaran 40% terbawah. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS (2019), diperoleh rata-rata Nasional APM menurut kelompok pengeluaran 40% terbawah jenjang SD/ sederajat sebesar 97,6, jenjang SMP/ sederajat sebesar 77,02, dan jenjang SM sebesar 53,38. Selanjutnya mengenai capaian tingkat Provinsi yang dituangkan pada gambar 1, untuk jenjang SD/ sederajat terdapat 11 dari 34 Provinsi yang memiliki rata-rata di bawah Nasional, untuk jenjang SMP/ sederajat terdapat 17 dari 34 Provinsi yang memiliki rata-rata di bawah Nasional, dan untuk jenjang SM/ sederajat terdapat 14 dari 34 Provinsi yang memiliki rata-rata di bawah Nasional.



Gambar 1. Capaian APM Menurut Jenjang dan Provinsi pada Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah Tahun 2018 (Sumber: BPS, 2019)

Capaian APM tersebut jika dilihat menurut kewilayahan (gambar 2) hingga saat ini disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. APM di Perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APM di Perdesaan. Untuk APM SD/ sederajat di perkotaan mencapai 97,92 sedangkan di perdesaan turun menjadi 97,3, untuk jenjang SMP/ sederajat di perkotaan 79,59 dan di perdesaan turun menjadi 74,26, selanjutnya untuk APM SM di perkotaan sebesar 59,83 dan mengalami penurunan di perdesaan menjadi 47,73. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (*drop out*), sehingga berpengaruh terhadap APM.



Gambar 2. Capaian APM Menurut Jenjang dan Wilayah pada Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah Tahun 2018 (Sumber: BPS, 2019)

Dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan akses pendidikan, Pemerintah memberikan bantuan dana berupa Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) dalam bidang pendidikan yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pra-sejahtera. Manfaat dari PIP akan didapatkan jika anak-anak tersebut mendaftar atau terdaftar di sekolah/madrasah, pondok pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C), dan lembaga pelatihan atau kursus. PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Program PIP telah dimulai sejak tahun 2015 sebagai improvisasi dari program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) yang telah berjalan sebelumnya.

Tabel 1. Besaran Dana BSM dan PIP per Siswa per Tahun Ajaran

No	Jenjang	BSM sebelum 2013/2014	BSM mulai 2013/2014	PIP 2015-2019
1	SD/ sederajat	Rp. 360.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-
2	SMP/ sederajat	Rp. 550.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-
3	SMA/ sederajat	Rp. 780.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-

Sumber: Kemdikbud 2012, Juknis BSM SMA, 2013, dan Perdirjen Dikdasmen No. 05/D/BP/2018

Meskipun telah berlangsung sejak tahun 2015, besaran manfaat yang diterima oleh penerima PIP tidak pernah berubah sejak masih bernama BSM. Besaran dana sendiri sudah sekali berubah pada tahun 2013 (lihat tabel 1). Berdasarkan tabel 1 di atas besaran ini tidak lagi relevan dengan kebutuhan riil para penerima, baik dari sisi nilai besaran maupun variasinya. Dari sisi nilai besaran biaya, laju inflasi yang terus berubah juga berpengaruh pada jumlah biaya kebutuhan pribadi penerima PIP. Sedangkan dari sisi variasi, perbedaan besaran antar jenjang pendidikan tentu penting, namun perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah juga perlu dipertimbangkan. Karena hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan besaran dana PIP yang diberikan kepada siswa menyesuaikan kebutuhan dan laju inflasi. Dana PIP diharapkan dapat membantu penerimanya memenuhi kebutuhan pribadi yang menunjang kegiatan bersekolah, idealnya dana tersebut dapat diterima oleh peserta didik sebelum atau setidaknya bersamaan dengan mulainya tahun ajaran baru (Herlinawati dkk., 2017).

Kemiskinan dan Pendidikan

Kemiskinan selalu menjadi permasalahan utama di setiap Negara. Menurut Walker (2014), kemiskinan berarti tidak bisa memberikan kehidupan di rumah, membayar sewa, atau membeli keperluan penting untuk anak-anak. Tekanan tidak memiliki uang secara terus menerus dapat dirasakan setiap orang yang mengalaminya dan berpengaruh secara emosional dan merasa tersingkir dari kehidupan sosial bermasyarakat.

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS (2019), pada semester 1 tahun 2019 persentase penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 9,41 persen. Meskipun nilainya turun, namun jika dilihat capaian per Provinsi masih ada 16 Provinsi yang penduduk miskinnya melebihi rata-rata Nasional, bahkan ada 3 Provinsi yang nilainya lebih dari 20 persen. Masih banyaknya daerah yang dilanda kemiskinan di Indonesia harus diberikan perhatian lebih dari Pemerintah khususnya perihal bantuan dana. Hal ini karena dampak kemiskinan bisa sangat luas, seperti pada sektor kualitas SDM, kesehatan, keamanan, dan sebagainya.

Faktor kemiskinan ternyata dapat berdampak pada kesempatan memperoleh pendidikan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mughala, dkk (2019), sebagian besar anak mengalami putus sekolah dikarenakan faktor kemiskinan. Karena alasan kemiskinan, sebagian besar anak-anak terpaksa menyelesaikan sekolah lebih awal. Di Negara Somalia juga ditemukan hal yang sama bahwa anak-anak dari sosial ekonomi yang lebih tinggi rumah tangga lebih cenderung bersekolah di sekolah formal daripada di rumah tangga sosial ekonomi rendah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan dari kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan. Kerangka hukum menekankan wajibnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Semua anak, termasuk dengan latar belakang keluarga miskin, diwajibkan untuk mengikuti pendidikan. Orangtua harus menjamin bahwa anak-anak mereka mengikuti program pendidikan, terlepas dari bagaimanapun kondisi keuangan keluarga mereka.

Bagi pemerintah pusat dan daerah, ada suatu kewajiban yang nyata untuk membiayai pendidikan bagi semua murid yang memasuki usia wajib belajar. Ada pula sebuah kewajiban yang lebih khusus lagi untuk menjamin bahwa murid-murid tidak akan putus sekolah dari layanan pendidikan akibat kondisi finansial keluarga mereka.

Biaya Pribadi Peserta Didik dan Alokasi Dana PIP

Menurut Saruparia (2013), biaya pribadi merupakan biaya yang ditanggung oleh individu, atau orang tua atau keduanya. Selanjutnya dibagi menjadi pribadi langsung biaya dan biaya pribadi tidak langsung. Biaya pribadi langsung adalah pengeluaran yang dikeluarkan langsung oleh rumah tangga untuk pendidikan individu sementara biaya pribadi tidak langsung (*opportunity cost*) adalah pendapatan yang hilang oleh siswa sementara memperoleh pendidikan dan tidak dipekerjakan di tempat lain. Dalam melakukan perhitungan biaya pribadi didasarkan pada data primer dan melibatkan banyak item pengeluaran.

Menurut Levin dalam Ismail, dkk (2016) biaya pribadi pendidikan merupakan beban ekonomi bagi rumah tangga dan bisa diukur dengan rasio terhadap pendapatan rumah tangga. Pada dasarnya, biaya pribadi langsung dan tidak langsung telah didanai oleh rumah tangga secara terus menerus selama ini agar siswa tetap di sekolah, perguruan tinggi atau universitas. Dalam perhitungannya membutuhkan banyak perubahan karena ada beberapa faktor seperti fluktuasi ekonomi, inflasi dan perubahan kebijakan pendidikan. selain pertimbangan tersebut, perlu juga mempertimbangkan jenjang pendidikan, khususnya SMK. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor David Greatbatch dari Inggris pada Januari 2017 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur pendanaan dan pengaturan pengeluaran pendidikan terutama untuk sekolah kejuruan termasuk biaya magang. Selain masalah besaran dana, aspek lain yang cukup banyak disinggung dalam kajian adalah ketepatan sasaran. Kajian Puslitjak pada 2017 juga merekam berbagai keresahan sekolah terkait banyaknya penerima PIP yang pada dasarnya tidak layak. Di Kabupaten Banyumas, misalnya, terdapat laporan adanya anak dokter spesialis dan beberapa anak orang berada yang memperoleh PIP (Zamjani, 2018).

Dalam upaya mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, Pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan untuk peserta didik kelompok pengeluaran 40% terbawah dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP). Pengelolaan PIP oleh

Kemendikbud didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif. Inpres tersebut menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam pemberian bantuan dana PIP akan memiliki manfaat lebih maksimal bagi siswa penerima jika besarnya mendekati kebutuhan riil peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah Berapa besaran biaya satuan peserta didik yang dapat diberikan kepada penerima PIP yang ideal untuk kelompok pengeluaran 40% terbawah? Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah menghitung besaran biaya satuan peserta didik yang dapat diberikan kepada penerima PIP dari masing-masing jenjang pendidikan dengan memperhatikan kondisi kelompok pengeluaran 40% terbawah.

METODE

Dalam mengkaji kebutuhan biaya satuan pribadi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pengeluaran, yaitu seberapa besar dan untuk komponen apa saja biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sumber data utama yang digunakan dalam perhitungan biaya satuan pribadi peserta didik adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018. Jenis data yang digunakan adalah Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) Tahun 2018, untuk memperoleh gambaran makro mengenai pembiayaan pendidikan seperti biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah semua biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan responden, di kelas/tingkat yang saat ini sedang ditempuh.

Data Susenas yang dijadikan dasar perhitungan penelitian ini merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, yaitu meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Ruang lingkup Susenas MSBP 2018 mencakup populasi penduduk yang tinggal di rumah tangga biasa. Adapun penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus seperti panti jompo, panti asuhan, barak polisi/militer, dan penjara tidak dicakup. Sampel Susenas MSBP 2018 sebanyak 75.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Data hasil Susenas MSBP dapat disajikan untuk tingkat nasional maupun provinsi. Susenas dengan modul MSBP dapat diandalkan dalam penghitungan karena dilakukan secara rutin setiap 3 tahun sekali. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan hasilnya untuk memproyeksikan kebutuhan biaya paling tidak untuk 3 – 5 tahun ke depan.

Langkah selanjutnya dalam menentukan biaya satuan pribadi peserta didik adalah menentukan komponen biaya pendidikan. Dalam data hasil Susenas BPS, terdapat 16 komponen jenis biaya pendidikan yang meliputi: uang pendaftaran, SPP, komite sekolah, ekstrakurikuler, baju sekolah dan perlengkapan, tutup kepala dan alas kaki, buku pelajaran, bahan belajar, alat tulis dan perlengkapan, praktikum dan penunjang, kursus di sekolah, evaluasi/ujian, kunjungan edukatif, biaya lainnya, uang saku, dan uang transport. Berdasarkan 16 komponen biaya pendidikan tersebut, dilakukan penyederhanaan komponen biaya pendidikan dengan menggabungkan komponen yang berkategori sama. Misalnya, tutup kepala dan alas kaki dapat dimasukkan ke dalam komponen pakaian sekolah. Hal ini tanpa mengurangi nilai dari masing-masing komponen biaya pendidikan. Adapun jenis biaya pendidikan yang menjadi komponen penentuan besaran biaya satuan

pribadi peserta didik antara lain: uang pendaftaran, komite sekolah, ekstrakurikuler, pakaian sekolah, buku, bahan belajar, alat tulis, praktikum, kursus, ujian, study tour, uang saku, uang transportasi, dan biaya lainnya.

Setelah menetapkan komponen biaya dari basis data, dilakukan penyesuaian dengan komponen Biaya Operasional Sekolah (BOS). Hal ini mengacu kepada petunjuk teknis BOS terakhir yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS. Dalam Juknis tersebut terdapat 11 komponen yang dibiayai oleh BOS yang memiliki irisan dengan komponen yang terdata oleh Susenas 2018. Komponen yang beririsan tersebut selanjutnya dikeluarkan dari komponen penghitungan biaya satuan yang didanai PIP. Selain komponen yang beririsan, analisis juga dilakukan lebih jauh untuk mengeliminasi pembiayaan komponen yang bertentangan dengan aturan. Dalam lampiran 1 Juknis BOS tentang tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban BOS regular dinyatakan tujuan BOS sebagai berikut:

- a. BOS regular pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat
- b. BOS regular pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Hal ini berarti biaya SPP dan iuran komite sekolah perlu dieliminasi dari komponen biaya satuan PIP untuk SD/SMP. Sedangkan untuk SMA/SMK masih dipertahankan. Setelah penentuan jenis biaya pendidikan, langkah selanjutnya adalah menghitung seluruh komponen biaya menjadi total biaya satuan PIP. Hasil dari perhitungan tersebut adalah biaya satuan PIP peserta didik tahun 2018. Untuk menghitung angka kelompok pengeluaran 40% terbawah berdasarkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok per-sepuluh sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah
- b. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah
- c. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya
- d. Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

HASIL

Dalam menentukan komponen biaya pribadi pendidikan yang akan dibiayai melalui PIP, penelitian ini juga menganalisis jenis biaya pendidikan yang telah dibiayai oleh BOS. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS, terdapat 11 komponen yang dibiayai oleh BOS (lihat tabel 2). Dalam melakukan analisis komponen, dilakukan identifikasi terhadap komponen yang beririsan antara hasil-hasil penelitian terdahulu dan komponen BOS. Dalam hal ini komponen Susenas dipilih sebagai komponen yang dirujuk karena relatif mencakup keseluruhan komponen dari studi lainnya. Selain itu, data Susenas lebih dapat diandalkan karena selalu diperbarui secara rutin setiap tiga tahun sekali. Dari 11 komponen BOS, terdapat 6 komponen yang merupakan

komponen biaya operasional yang sepenuhnya tidak memiliki irisan dengan biaya personal sebagaimana terekam dari Susenas, yaitu: pengelolaan, pengembangan profesi GTK, daya dan jasa, pemeliharaan sarpras, pembayaran honor, dan pembelian dan perawatan media pembelajaran. Sedangkan empat lainnya adalah komponen biaya yang beririsan dengan komponen biaya personal Susenas, sehingga dalam penghitungan biaya satuan PIP komponen yang beririsan tersebut harus dikeluarkan.

Tabel 2. Persandingan Komponen Biaya

No.	Susenas MSPB BPS (2015 & 2018)	Komponen BOS (2019)	Usulan Komponen PIP
1	Pendaftaran	Buku teks	Iuran komite
2	SPP	PPDB	Pakaian sekolah
3	Komite sekolah	Pembelajaran dan ekstrakurikuler	Bahan belajar
4	Ekstrakurikuler	Evaluasi	Alat tulis
5	Baju sekolah dan perlengkapan	Pengelolaan	Kursus
6	Topi dan alas kaki	Pengembangan profesi GTK	Study tour
7	Buku pelajaran/panduan/diktat	Daya dan jasa	Uang saku
8	Bahan Belajar	Pemeliharaan sarpras	Transportasi
9	Alat tulis dan perlengkapan lainnya	Pembayaran honor	
10	Praktikum dan bahan penunjang	Beli dan rawat media belajar	
11	Kursus	Biaya lainnya	
12	Evaluasi/ujian		
13	Kunjungan edukatif (<i>study tour</i>)		
14	Uang saku		
15	Transportasi		
16	Lainnya		

Dalam lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS disebutkan bahwa salah satu tujuan BOS adalah membebaskan pungutan bagi siswa dari keluarga tidak mampu di SD dan SMP dan membebaskan dan/atau meringankan pungutan bagi siswa dari keluarga tidak mampu di SMA dan SMK. Hal ini berarti, iuran komite dan SPP juga harus dikeluarkan dari komponen biaya satuan PIP untuk SD dan SMP dan mempertahankannya bagi SMA dan SMK. Biaya kursus juga tetap dipertahankan dalam PIP, namun peruntukannya bukan untuk kursus di sekolah, namun kursus yang dilakukan di luar sekolah. Studi Supriadi dan Ghazali dkk. juga mencantumkan biaya kursus tersebut sebagai komponen biaya pribadi. Supriadi bahkan memisahkan secara spesifik antara kursus di sekolah dan di luar sekolah.

Tabel 3. Daftar Komponen Biaya Satuan PIP per Jenjang Pendidikan

No.	Komponen	SD/SMP	SMA/SMK
1	Iuran Komite/SPP	X	V
2	Pakaian Sekolah	V	V
3	Bahan Belajar	V	V
4	Alat Tulis	V	V
5	Kursus	V	V
6	Study Tour	V	V
7	Uang Saku	V	V
8	Transportasi	V	V

Dari berbagai telaah ini ditetapkan 7 komponen jenis biaya pendidikan untuk jenjang SD dan SMP, meliputi pakaian sekolah, bahan belajar, alat tulis, kursus, study tour, uang saku, dan uang transportasi. Adapun pakaian sekolah yang dimaksud dalam jenis biaya pendidikan tersebut meliputi seragam, topi, sepatu, kaos kaki, dan sebagainya. Untuk komponen alat tulis merupakan meliputi buku tulis, pensil, pulpen, penggaris dan

sebagainya. Selanjutnya, yang dimaksud kursus adalah kegiatan belajar tambahan yang dilakukan di luar jam sekolah yang diselenggarakan oleh bimbingan belajar. Sementara untuk SMA/SMK, diperoleh 8 komponen jenis biaya pendidikan yang meliputi: iuran komite, pakaian sekolah, bahan belajar, alat tulis, kursus, *study tour*, uang saku dan uang transportasi.

Selanjutnya dihitung biaya satuan yang dikeluarkan oleh kelompok penduduk 40% terbawah. Hal ini untuk menyelaraskan dengan sasaran PIP yang diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT). BDT sendiri adalah data penduduk yang secara sosial ekonomi berada pada kelompok 40% terbawah. Perhitungan biaya satuan dengan menggunakan kelompok 40% terbawah dilakukan untuk menyesuaikan dengan target sasaran PIP sebagaimana dicerminkan dari basis data yang digunakan untuk menyeleksi penerima. Dari perhitungan tersebut didapat angka yang lebih rendah dari rata-rata total nasional untuk masing-masing jenjang pendidikan. Hasil perhitungan rata-rata biaya satuan pribadi dengan rata-rata nasional dapat dilihat di tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Rata-rata Biaya Satuan Pribadi Kelompok 40% Terbawah (Nasional) (Rp)

	Jenis Biaya Pendidikan		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SD	Pakaian Sekolah		199.661	212.508	226.007	239.835	253.949
Bahan Belajar			29.024	30.892	32.854	34.864	36.916	39.002
Alat Tulis			61.402	65.353	69.504	73.757	78.097	82.511
Kursus			2.878	3.063	3.258	3.457	3.661	3.868
Study Tour			6.758	7.193	7.650	8.118	8.596	9.081
Uang Saku			949.224	1.010.300	1.074.477	1.140.219	1.207.318	1.275.549
Uang Transportasi			156.153	166.201	176.758	187.573	198.612	209.836
Biaya Satuan Per Peserta Didik			1.405.101	1.495.510	1.590.509	1.687.824	1.787.149	1.888.149
SMP	Pakaian Sekolah		275.579	293.311	311.943	331.029	350.509	370.318
	Bahan Belajar		45.913	48.867	51.972	55.151	58.397	61.697
	Alat Tulis		77.011	81.966	87.172	92.506	97.950	103.485
	Kursus		4.126	4.391	4.670	4.956	5.247	5.544
	Study Tour		30.461	32.421	34.480	36.590	38.743	40.933
	Uang Saku		1.527.120	1.625.380	1.728.629	1.834.394	1.942.345	2.052.116
	Uang Transportasi		561.495	597.623	635.586	674.474	714.166	754.527
	Biaya Satuan Per Peserta Didik		2.521.705	2.683.959	2.854.452	3.029.100	3.207.357	3.388.619
SMA/ SMK	SPP/Sumbangan Komite		710.510	756.226	804.264	853.472	903.697	954.769
	Pakaian Sekolah		263.020	279.944	297.727	315.943	334.536	353.442
	Bahan Belajar		45.474	48.400	51.474	54.624	57.838	61.107
	Alat Tulis		80.448	85.624	91.063	96.635	102.322	108.104
	Kursus		3.717	3.957	4.208	4.465	4.728	4.995
	Study Tour		41.560	44.234	47.044	49.922	52.860	55.848
	Uang Saku		2.015.842	2.145.548	2.281.840	2.421.452	2.563.950	2.708.851
	Uang Transportasi		931.674	991.620	1.054.611	1.119.137	1.184.996	1.251.966
Biaya Satuan Per Peserta Didik		4.092.245	4.355.553	4.632.231	4.915.651	5.204.928	5.499.082	

Sumber: Diolah dari Susenas MSBP 2018 dan Juknis BOS 2019

. Berdasarkan hasil perhitungan, pada tabel 4 di atas besaran biaya satuan untuk skala Nasional tahun 2019 menurut indikator ekonomi diperoleh hasil untuk jenjang SD sebesar Rp 1.495.510, jenjang SMP sebesar Rp 2.683.959, dan jenjang SM sebesar Rp 4.355.553. Nilai dari beberapa komponen biaya dapat dicermati dan dibandingkan dengan harga yang ada di pasar. Salahsatu komponen yang perlu dicermati adalah seragam

sekolah. Berdasarkan harga pasar sebagaimana dapat dilihat dari salah satu platform belanja daring populer, yaitu tokopedia, harga satu potong seragam termurah di Jakarta adalah Rp 41.000 (baju) dan Rp 50.000 (rok/celana). Dengan besaran seragam sekolah yang berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per tahun dapat digunakan untuk membeli 2 hingga 3 potong seragam sekolah. Secara umum, anak-anak sekolah membutuhkan minimal 3 jenis seragam sekolah yang terdiri dari seragam reguler, seragam pramuka, dan pakaian olahraga. Dengan asumsi seorang peserta didik hanya memiliki 1 potong untuk masing-masing jenis seragam tanpa baju cadangan, maka angka Rp 300 ribu adalah besaran yang sangat minimal. Di beberapa daerah lain harganya bisa jadi berbeda-beda. Selain itu, ini belum termasuk pakaian lain yang juga dibutuhkan seperti topi, dasi, sepatu, dan kaus kaki.

Komponen lain yang perlu dicermati adalah alat tulis. Alat tulis sekolah di sini mencakup buku tulis, buku gambar, pensil, pena, penghapus, dan penggaris. Untuk satu tahun setidaknya dibutuhkan 10-20 eksemplar buku tulis. Dari laman salahsatu toko online didapatkan bahwa harga 1 paket berisi 10 eksemplar buku tulis merk tertentu adalah Rp 23.000. Jika dikalikan sesuai kebutuhan satu tahun, setidaknya dibutuhkan Rp 46.000. Sementara itu, untuk alat-alat tulis adalah: buku gambar (Rp 3.000), pensil (Rp 1.250), penghapus (Rp 2.300), pulpen (Rp 5.000), dan penggaris (Rp 4.000). Jika masing-masing dikalikan dua, maka didapatkan angka sebesar Rp 31.100 per orang. Jika dijumlahkan, nilai kebutuhan buku tulis dan alat tulis ini mencapai Rp 77.100. Angka ini mendekati hasil penghitungan Susenas yang diproyeksikan untuk tahun 2020, yang berkisar antara Rp. 69.000 (SD) hingga Rp. 91.000 (SMA).

SIMPULAN

Setelah dilakukan penyesuaian antara Juknis BOS dan hasil Susenas 2015, komponen biaya satuan yang dapat dibiayai dalam PIP dibedakan antara jenjang SD dan SMP di satu sisi dan jenjang SMA dan SMK di sisi yang lain. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara BOS dan PIP sebagai bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN. Berdasarkan hasil perhitungan, besaran biaya satuan untuk skala Nasional tahun 2019 menurut indikator ekonomi diperoleh hasil untuk jenjang SD sebesar Rp 1.495.510, jenjang SMP sebesar Rp 2.683.959, dan jenjang SM sebesar Rp 4.355.553. Implikasi penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan besaran PIP ideal yang mendekati kebutuhan riil peserta didik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Pimpinan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dan tim pendanaan pendidikan Puslitjakdikbud atas dukungannya dalam proses penelitian mengenai perhitungan biaya satuan peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2019). Data Rata-rata Nasional APM menurut kelompok pengeluaran 40% Terbawah. Diunduh melalui website <https://www.bps.go.id> pada 23 Oktober 2019
- Greatbatch, David and Sue Tate. (2017). *Funding and Expenditure in Post-16 Education: An International Review*. London: Departemen for Education UK

- Herlinawati, Bambang Indriyanto, Catur Dyah Fajarini, & Sudiyono. (2017). *Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
- Ismail, Ramlee., Awang, Marimah., Noor, Mohd Asri Mohd. (2016). Analysis of Private and Social Costs of Education in Malaysia: An Overview. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 2016, Vol. 6, No. 11, page 24-37. ISSN: 2222-6990. DOI: 10.6007/IJARBS/v6-i11/2371
- Liao, L., Du, M., Wang, B., Yu, Y. (2019). The Impact of Educational Investment on Sustainable Economic Growth in Guangdong, China: A Cointegration and Causality Analysis. *Sustainability* 2019, 11, 766; doi: 10.3390/su11030766, page 1-16. www.mdpi.com/journal/sustainability.
- Lusiana, L. (2017). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara: Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013. *Jurnal Administrasi Negara*, 6 (1), 6991-7005
- Saruparia, Chitra Dr, and Lodha, S.L Dr. (2013). Private and Social Cost of Technical and Professional Education With reference to J.N.V. University, Jodhpur (Rajasthan) India. *Developing Country Studies* ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online) Vol.3, No.3, 2013
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2015). The Investment Case for Education and Equity, page 1-130. Diunduh melalui https://www.unicef.org/publications/files/Investment_Case_for_Education_and_Equity_FINAL.pdf pada tanggal 22 Oktober 2019
- Walker, R. (2014) *The shame of poverty*. Oxford: Oxford University Press.
- Widiansyah, Apriyanti. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala*, Vol. XVII, No. 2, September 2017, 207-215.
- World Economic Forum. (2017). *The Global Human Capital Report 2017: Preparing people for the future of work*. Diunduh melalui http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf pada tanggal 23 September 2019
- Zamjani, Irsyad. (2018). "Pelaksanaan Program Indonesia Pintar bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017." *Jurnal Penelitian Kebijakan*, 11(2): 64-82